

## LAHAN KOSONG

### Wacana Elitis Pendudukan dan Eksploitasi Ruang Urban

Oleh: Yoshi Fajar Kresno Murti



*Tips dari Tipo* ini untuk menunjukkan bagaimana orang mencari tanah itu berangkat dari asumsi "kekosongan". Dan kenyataannya, sebuah lahan "kosong" itu tidaklah kosong. Karya Prihatmoko "Moki", Komik TIPO (Tips dari Tipo), 2011, diunduh dari Facebook 22 Februari 2012.

Sekarang-kurangnya ada tiga hal yang saling terkait – dan yang sekaligus perlu dijernihkan terlebih dahulu – ketika kita membicarakan posisi lahan kosong di dalam konteks alam urban Indonesia saat ini, lebih khusus lagi di Pulau Jawa. Ketiga hal yang selalu terkait dengan posisi lahan kosong tersebut, yaitu:

#### 1. Asset atau kepemilikan.

Di dalam lansekap alam urban seperti sekarang ini sesungguhnya yang disebut "lahan kosong" atau "tanah kosong" tidaklah benar-benar sepenuhnya ada. Ia selalu terkait dengan (kuasa) kepemilikan tanah. Sebuah *asset* dari nilai properti dan representasi kuasa modal (ekonomi, politik, dan budaya). Dalam posisinya sebagai *asset*, atau dengan kuasa kepemilikan, sebuah lahan kosong yang ditemui saat ini nantinya bisa dijadikan sebagai apa saja, bisa dibangun untuk menjalankan diri sebagai fungsi tertentu dan merepresentasikan (kuasa) identitas tertentu.

## 2. Lokasi atau tempat.

Di dalam lansekap praktik hidup urban sesungguhnya setiap jengkal lahan merupakan sebuah tempat atau lokasi yang akan bisa dianggap sebagai “lahan kosong” (baca: sebagai *frontier*). Bahkan, meskipun sebuah area sudah dihuni oleh ribuan orang urban, tetap saja para penghuni lahan tersebut bisa dipindah, ditata dan digusur. Lahan kosong bukan hanya perkara fisik yang menunjukkan sebuah area yang “kosong”, tetapi juga perkara pikiran (*mind*) yang memahami setiap jengkal tanah sebagai tempat atau lokasi yang “kosong”, yang dilihat berjarak dan dari atas. Sebuah tempat atau lokasi lebih banyak dipikir dalam kaitannya dengan fungsi dan nilai strategis ekonomi, yang seringkali justru “mengosongkan” kehidupan yang telah berlangsung lama atasnya.

## 3. Ruang hidup.

Di dalam lansekap realitas urban, sebuah lahan kosong tidak hanya mengandung potensi konflik, ia selalu mengandung celah negosiasi kepentingan antarpihak, sekaligus representasi dari dinamika praktik negosiasi setiap orang yang berkontestasi (hidup) di kota. Lahan kosong adalah ruang hidup yang dinamis yang bisa menjadi celah dan bisa dimasuki siapapun juga di dalam konteks sesaknya ruang urban.

\*\*\*

Dengan posisi lahan kosong dalam kaitannya dengan tiga hal seperti telah dijelaskan di atas, fakta sebuah lahan “kosong” di kota itu bukanlah kosong. Tidak ada, bahkan mustahil. Kosong menurut siapa atau pihak mana? Mungkin bisa disebut dengan pengertian: lahan terlantar. Tetapi terlantar menurut siapa atau pihak mana? Bukankah sekecil apapun fungsi yang dikenakan pada sebuah area “kosong”, tetap saja sebuah area atau teritori yang disebut “terlantar” menjadi bagian dari ekosistem? Bukankah tetap ada tumbuhan dan binatang yang entah pasti hidup di atasnya dan menjadi bagian dari kehidupan?

Sesungguhnya, “lahan kosong” hanya hidup di alam pikiran. Ia merupakan wacana pendudukan manusia atas ruang. Dan, bagaimanakah cara pendudukan atas ruang tersebut dinarasikan di Kota Yogyakarta?

Dijual Tanah...  
Hub: Tuhan,  
street art karya  
Thepo Po,  
2011.  
Diunduh dari  
Facebook 22  
Februari 2012.





## II. Tanah dan Narasi Pendudukan Ruang di Yogyakarta

Selama ini, konflik perkotaan, pergolakan kota, konflik antarras, pemogokan dan kerusakan adalah ekspresi ketegangan yang melanda penduduk kota dan perjuangan mereka dalam menguasai sarana reproduksi – yakni, lahan di kota.<sup>1</sup> Tanah. Konsepsi hak milik penguasaan tanah sekaligus sebagai legitimasi konsesi eksploitasi atasnya, serta perspektif mengenai ruang hidup dan ruang berusaha, saat ini sudah begitu kompleks persoalannya. Belum lagi soal absennya negara, regulasi serta rencana tata ruang yang tidak pernah jelas, semakin menambah pelik dan spesifik setiap persoalan di ruang kota. Dalam banyak hal, pendudukan dan perjuangan penguasaan lahan di kota seringkali didasari oleh anggapan makna-makna “kekosongan” atas lahan tersebut. Kekosongan yang sesungguhnya dijalankan sebagai kata kerja: pengosongan. Pengosongan dari bangunan, pengosongan dari aktivitas, pengosongan dari peraturan, pengosongan dari tuntutan, dan pengosongan dari potensi konflik. Lahan atau tanah kosong merupakan wacana elitis. Ia merupakan terminologi yang dihasilkan dari memandang ruang kota (modern) dari atas, berjarak dan sebagai tempat. Namun, meskipun begitu, bagi sebagian besar kaum urban, “kosong” juga berarti kesempatan, yaitu sebuah celah yang bisa dimasuki untuk hidup dan berusaha. Dalam hal ini, ruang kota diisi dengan kisah perjuangan hidup sebagai kaum urban.

Dalam konteks Kota Yogyakarta, saya menemukan dua kosakata yang bisa menggambarkan bagaimana narasi pendudukan ruang kota berikut nalar yang mendasarinya. Di satu sisi, narasi pendudukan ruang kota merupakan kisah perjalanan mengenai bagaimana perjuangan kaum urban mengisi ruang urban dengan siasat dan strategi hidupnya. Disisi yang lain, narasi pendudukan ruang kota merupakan kisah pengosongan demi pengosongan ruang kota yang diubah menjadi aset, modal dan berfungsi sebagai tempat.

### 1. Narasi *mBabat Alas*

Narasi *mBabat Alas* merupakan kisah pendudukan ruang kota sebagai ruang untuk bertahan hidup, menjadi bagian dan menyesuaikan diri dengan lingkungan perkotaan dan membentuk komunitasnya. Ruang kota merupakan kesempatan yang diperoleh dengan perjuangan dan digunakan untuk bertahan hidup di tengah kompleksitas sistemik ruang kota yang buas. Praktiknya dengan demikian seringkali mengabaikan batas-batas regulasi sekaligus batas-batas kepemilikan ruang yang di tetapkan secara sepihak oleh penguasa kota.

Sejak dibukanya jalur transportasi kereta api maupun jalan besar yang membelah Yogyakarta pada paruh abad XVIII, kota ini diserbu oleh para pendatang yang berangsur-angsur banyak menempati di daerah-daerah yang dianggap “kosong”, misalnya daerah di pinggir sungai yang disebut sebagai: *wedhi kengser*, *bong* (area perkuburan etnis Tionghoa) dan juga di area-area permukiman lainnya yang sudah ada: kampung. Konflik ruang kota yang berwujud

---

<sup>1</sup> Hans-Dieter Evers & Rudiger Korff: *Urbanisme di Asia Tenggara*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002; hal. 296.

perebutan dan pertarungan atas pendudukan lahan kota di Yogyakarta yang notabene berstatus tanah “istimewa” (*Sultan Ground dan Paku Alam Ground*), sebenarnya membuka peluang untuk bisa dinegosiasikan diluar aspek legal - ilegal ataupun formal - informal. Mereka yang memandang ruang kota sebagai kesempatan ini terdiri dari para pencari sekaligus pencipta kerja di kota Yogyakarta, ketika konteks sebuah kota merupakan sebuah peluang hidup modern dalam membuka sentrum-sentrum ekonomi penghidupan.

## 2. Narasi *Bancakan*

Narasi *Bancakan* adalah kisah pendudukan ruang kota sebagai obyek, bahan, kapling, investasi, *asset*, dan modal. Ruang kota diubah menjadi tempat yang digunakan untuk menciptakan batas, mengontrol, menutup kesempatan terhadap keberadaan yang lain (proses marginalisasi) supaya bisa menjalankan fungsinya yang strategis sebagai lokasi dan meningkatkan nilai komoditasnya. Narasi *bancakan* merupakan narasi pengosongan ruang kota dalam arti yang sesungguhnya.

Selain diserbu oleh para pencipta dan pencari kerja, di satu sisi, ruang kota juga diserbu dengan jenis pendudukan yang memahami ruang kota sebagai obyek, bahan, dan modal. Misalnya, berdasarkan ingatan banyak orang di kampung, ketika tahun 70 – 80 an golongan elit Orde Baru yang terdiri dari tentara dan pegawai negeri berangsur-angsur mulai “memborong” tanah-tanah “kosong” di Yogyakarta ketika mereka diuntungkan oleh pembangunan (*boom* minyak).<sup>2</sup> Atau misalnya ketika masa sesudah krisis 98 mulai marak di media massa mengenai kasus pengkaplingan lahan-lahan kota oleh para pejabat dan mulai dipersoalkannya status tanah yang tidak jelas serta status Kota Yogyakarta sebagai daerah keistimewaan (misalnya kasus pengkaplingan tanah di Tungkak, Sorosutan, Jatimulyo, ataupun kasus pen-sertifikatan Hotel Ambarukmo atas nama Sultan HB X). Awal tahun 2000, Yogyakarta juga dilanda demam pembangunan mal-mal dan pengalih-fungsian ribuan hektar sawah, kebun dan tanah-tanah “terlantar” menjadi perumahan atau *real estate*.



\*\*\*

Skala konflik ruang kota, yang berujung pada penggusuran sebagai pola dan alat penyelesaiannya, semakin meningkat dan semakin ditegaskan menjadi menu sehari-hari wajah penataan kota-kota besar di Indonesia. Penggusuran bisa dilakukan oleh pihak manapun saja,

---

<sup>2</sup> Keuntungan ekonomi nasional oleh *booming* minyak pada kurun waktu 1970-an, serta pulangnya ekspatriat. Salah satunya menyebabkan kepemilikan tanah telah berpindah tangan menjadi milik jenderal dan keluarganya, pejabat tinggi negara, konglomerat, dan golongan kelas atas Indonesia. Lihat: Hans-Dieter Evers & Rudiger Korff: *Urbanisme di Asia Tenggara*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002; hal. 308.

bukan hanya oleh negara. Dilihat dari sudut pandang manapun, pengusuran merupakan wujud penggunaan kekerasan dalam konflik ruang kota. Ia merupakan puncak kekerasan yang dilakukan meski atas nama hukum, ketertiban, keindahan, dan kebersihan kota. Pengusuran mengingkari hal paling dasar dari semua itu, yaitu: makna keberadaan manusia. Pengusuran merupakan potret ketika sebuah pihak menganggap lahan di kota sebagai “kosong”.

Tindakan yang mengikuti di dalam konflik ruang kota				
Narasi <i>tergusur</i>			Narasi <i>penggusur</i>	
<i>ngeyel</i>	<i>mburoq</i>	<i>ndelik(an)</i>	<i>penataan</i>	<i>penertiban</i>
Tetap bertahan apapun yang terjadi bahkan tanpa alasan apapun	Nekad menduduki	Kucing-kucingan. Lari, sembunyi, dan datang kembali	Memaksa melakukan intervensi ruang atas nama perencanaan kota.	Memaksa melakukan intervensi ruang atas nama hukum formal (legalitas)

### III. Pertanyaan untuk Kerja *Bon(g) Suwung*

Bagaimana strategi kerja *Bon Suwung* dalam menarasikan sekaligus terlibat dengan ruang kota di tengah tegangan dan jebakan terminologi “lahan kosong”?

Proyek Seni di Ruang Publik “Di sini akan dibangun mall”, Oktober 2004.

